

## BUKU III

# RENCANA INDUK SMART CITY KABUPATEN BENER MERIAH



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
<b>II. VISI SMART CITY KABUPATEN BENER MERIAH</b> .....	4
2.1 Visi Smart City Kabupaten Bener Meriah .....	4
2.2 Misi Smart City Kabupaten Bener Meriah .....	4
<b>III. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY</b> .....	7
3.1 Smart Governance .....	7
3.2 Smart Branding .....	9
3.3 Smart Economy .....	11
3.4 Smart Living.....	12
3.5 Smart Society .....	14
3.6 Smart Environment.....	15
<b>IV. PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY</b> .....	18
4.1 Rencana Aksi.....	18
4.2 Road Map Smart City .....	38
4.3 Quick Win .....	45
<b>V. PENUTUP</b> .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Peta Penyebaran Jaringan Intranet FO Kabupaten Bener Meriah.....	25
Gambar 2 Data Peta Penyebaran Jaringan Intranet FO Metro-E Pemkab Bener Meriah.....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penjabaran Visi Smart City Kabupaten Bener Meriah.....	4
Tabel 2 Misi Smart City Kabupaten Bener Meriah.....	4
Tabel 3 Sinkronisasi Misi Smart City dan Misi RPJPD Kabupaten Bener Meriah .....	5
Tabel 4 Strategi Pembangunan Smart Governance .....	8
Tabel 5 Strategi Pembangunan Smart Branding.....	10
Tabel 6 Strategi Pembangunan Smart Economy .....	12
Tabel 7 Strategi Pembangunan Smart Living.....	13
Tabel 8 Strategi Pembangunan Smart Society .....	15
Tabel 9 Strategi Pembangunan Smart Environment.....	16
Tabel 10 Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan Smart City Kabupaen Bener Meriah ...	20
Tabel 11 Rencana Aksi Pengembangan Kelembagaan Smart City Kabupaten Bener Meriah .....	23
Tabel 12 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City Kabupaten Bener Meriah .....	27
Tabel 13 Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi dan Software Pendukung.....	30
Tabel 14 Layanan Aplikasi Yang Digunakan pada OPD Kabupaten Bener Meriah.....	32
Tabel 15 Rencana Aksi Penguatan Literasi .....	33
Tabel 16 Fase Program Jangka Pendek (Tahun 2022-2023).....	39
Tabel 17 Fase Program Jangka Menengah (Tahun 2022-2026).....	41
Tabel 18 Fase Program Jangka Panjang (Tahun 2022-2032).....	43
Tabel 19 Kegiatan Quick Win Smart City Kabupaten Bener Meriah .....	45

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan Kota Pintar (*Smart City*) pada beberapa wilayah kota di Indonesia menjadi sebuah keharusan sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan kota dan meningkatkan berbagai layanan pemerintah serta meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat setempat. Pengembangan kota berbasis *Smart City* bahkan dijadikan sebagai salah satu visi misi dan program kerja pada berbagai provinsi dan kota di Indonesia dan diinisiasi pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah/Kabupaten pada setiap wilayah di Indonesia.

Program *Smart City* ini juga dimasukkan dalam salah satu inovasi unggulan oleh Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB. Sejak tahun 2017 Kementerian Kominfo memulai program Gerakan Menuju 100 Smart City dimana Kementerian Kominfo mendampingi 100 Kabupaten/Kota sebagai percontohan dalam menyusun Rencana Induk (Renduk) *Smart City* dan menerapkan pada masing-masing daerah di Indonesia. Konsep *Smart City* merupakan konsep pembangunan kota/kabupaten berdasarkan pondasi Teknologi Informasi yang dirancang dan dilaksanakan untuk kepentingan umum secara efektif dan efisien. Dengan adanya pembangunan berbasis *Smart City*, maka terbukanya ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi beberapa kota/kabupaten dengan memanfaatkan teknologi sebagai enabling faktor.

Fenomena kota pintar seharusnya tidak serta merta mengubah identitas Kabupaten Bener Meriah yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah. Berdiri sejak tahun 2003, Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten muda di Provinsi Aceh yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004.

Nama “Bener Meriah” diambil dari nama salah seorang putra keturunan Raja Linge

XIII di Gayo, yaitu Beuner Meuria. “Bener Meriah” juga merupakan gabungan dari dua kata bener (Bahasa Gayo), dan meriah (Bahasa Indonesia). Bener berarti bagus, senang, indah; dan meriah berarti ramai, kebesaran, kemuliaan. “Bener Meriah” kemudian menjadi ungkapan yang berarti dataran luas yang indah, ramai, dan sejahtera.

Konsep pembangunan *Smart City* Kabupaten Bener Meriah harus dapat menyesuaikan diri atau adaptif dengan kearifan lokal. Segala pengembangan program inovasi yang dibuat sudah seharusnya berorientasi pada visi dan misi kabupaten Bener Meriah dan berlandaskan syariah Islam. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta masyarakat diharapkan mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep *Smart City* secara baik dengan melihat potensi dan permasalahan, kesiapan infrastruktur, serta Sumber Daya Manusia yang dimiliki, sehingga berkesinambungan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kabupaten Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan Kota Simpang Tiga Redelong dipilih sebagai ibukotanya. Posisi geografis terletak pada 4°33'50"-4°54'50" Lintang Utara dan 96°40'75"-97°17'53" Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 100-2500 mdpl. Kabupaten Bener Meriah memiliki luas wilayah darat 197.271,31 Ha. Adapun batas wilayah Kabupaten Bener Meriah, meliputi:

- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara
- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah

Secara administrasi, sampai dengan akhir tahun 2021 Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan. Kecamatan Syiah Utama merupakan kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Bener Meriah, dengan persentase luas daerah administrasi 41,96% dari total luas kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Bener Kelipah yang menempati 1,38% dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Syiah Utama. Jarak ibukota Syiah Utama, yaitu Desa Samar Kilang, ke ibukota kabupaten di Simpang Tiga

Redelong adalah 50,3 km.

Bener Meriah dengan ibu kotanya yang terletak di Simpang Tiga, Redelong merupakan Kabupaten dengan topografi daerah yang berbukit-bukit. Daerah ini terletak di wilayah pedalaman Aceh, tepatnya di dataran tinggi Gayo. Kawasan ini berada pada ketinggian antara 100 sampai 2.500 m di atas permukaan laut, bertemperatur antara 26 derajat Celsius dan 32,5 derajat Celsius. Penggunaan lahan di Kabupaten Bener Meriah sebagian besar digunakan untuk areal perkebunan, permukiman/perumahan, dan hutan.

Jumlah penduduk Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2021 berjumlah 164.813 jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi ada di Kecamatan Bukit berjumlah 30.138 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Syiah Utama dengan jumlah 2.237. Pada Tahun 2021 kepadatan penduduk di Kabupaten Bener Meriah adalah sebesar 84 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk 1,97% turun kembali setelah tahun yang lalu mengalami kenaikan sebesar 2,72% pada tahun 2020.

Dalam proses pembangunan *Smart City*, Kabupaten Bener Meriah melakukan berbagai persiapan menuju reformasi kota pintar. Dilakukan analisis kesiapan *Smart City* Kabupaten Bener Meriah guna mendapatkan gambaran kapasitas dan kapabilitas kota dalam menerapkan program-program pembangunan *Smart City*. Tiga komponen utama yang menjadi kajian yaitu kesiapan struktur, infrastruktur dan superstruktur. Analisis struktur kota dilakukan untuk mengetahui kondisi dari unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan Kabupaten Bener Meriah. Kesiapan infrastruktur di Kabupaten Bener Meriah memberi gambaran dan ukuran kondisi sarana dan prasarana fisik yang menjadi titik tolak dalam pembangunan *Smart City* daerah. Suprastruktur merupakan langkah penyiapan kebijakan atau peraturan Kabupaten Bener Meriah, kelembagaan, dan tata laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

Sistem pembangunan *Smart City* terdiri dari 6 (enam) dimensi, yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Dimensi-dimensi tersebut merupakan pendekatan terhadap tata kelola yang menysasar langsung isu-isu strategis dalam tatanan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, sehingga terwujud visi *Smart City* Kabupaten Bener Meriah yakni “Terwujudnya Bener Meriah yang Madani, Adaptif dan Inovatif”.

## II. VISI SMART CITY KABUPATEN BENER MERIAH

### 2.1 Visi Smart City Kabupaten Bener Meriah

Visi pengembangan *Smart City* di Kabupaten Bener Meriah adalah:

**“Terwujudnya Bener Meriah yang Madani, Adaptif dan Inovatif”.**

Visi *Smart City* Kabupaten Bener Meriah dapat dijabarkan dalam 2 (dua) kata kunci penting yaitu “Madani” dan “Adaptif dan Inovatif” yang maknanya dapat dijabarkan pada Tabel berikut:

*Tabel 1 Penjabaran Visi Smart City Kabupaten Bener Meriah*

<b>Madani</b>	Madani adalah jati diri, harga diri, dan budaya masyarakatnya berlandaskan Syariat Islam. Sehingga akan menciptakan kehidupan yang harmoni antar umat beragama.
<b>Adaptif dan Inovatif</b>	Membangun masyarakat yang tak kenal lelah belajar berbagai ilmu termasuk teknologi untuk meningkatkan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cerdas, sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup, dengan tata kota yang indah, nyaman, aman, dan bebas polusi secara berkelanjutan. Dengan demikian pada akhirnya Kabupaten Bener Meriah menjadi kota madani, hijau tangguh dan layak huni yang berkelanjutan.

### 2.2 Misi Smart City Kabupaten Bener Meriah

Agar pencapaian visi *Smart City* Kabupaten Bener Meriah tersebut dapat diwujudkan, maka disusunlah 6 (enam) misi yang dapat mendukung pelaksanaannya yang ditunjukkan pada Tabel berikut:

*Tabel 2 Misi Smart City Kabupaten Bener Meriah*

<b>No</b>	<b>Misi Smart City</b>	<b>Dimensi Smart City</b>
1	Misi 1: Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, layanan dan birokrasi yang efektif, inovatif dan efisien	<i>Smart Governance</i>
2	Misi 2: Mewujudkan pembangunan seluruh sektor yang berorientasi bisnis sekaligus meningkatkan nilai-nilai kedaerahan	<i>Smart Branding</i>

No	Misi Smart City	Dimensi Smart City
3	Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek sosio ekonomi, sosio kultural dan adaptif	<i>Smart Economy</i>
4	Misi 4: Mewujudkan Bener Meriah yang aman, damai, sehat, dan terdepan	<i>Smart Living</i>
5	Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang edukatif, islami, berkualitas, maju dan berkeadilan	<i>Smart Society</i>
6	Misi 6: Mewujudkan Bener Meriah yang lestari dan tangguh terhadap bencana	<i>Smart Environment</i>

Hubungan antara misi Smart City Bener Meriah terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

*Tabel 3 Sinkronisasi Misi Smart City dan Misi RPJPD Kabupaten Bener Meriah*

No	Misi Smart City	Misi RPJPD Bener Meriah 2005-2025
1	Misi 1: Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, layanan dan birokrasi yang efektif, inovatif dan efisien	Misi 3: Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
2	Misi 2: Mewujudkan pembangunan seluruh sektor yang berorientasi bisnis sekaligus meningkatkan nilai-nilai kedaerahan	Misi 7: Mewujudkan pembangunan sektor pertanian kopi dan energi terbarukan
3	Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek sosio ekonomi, sosio kultural dan adaptif	Misi 2: Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan spiritual Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju adil dan merata

No	Misi Smart City	Misi RPJPD Bener Meriah 2005-2025
4	Misi 4: Mewujudkan Bener Meriah yang aman, damai, sehat, dan terdepan	Misi 4: Mewujudkan bener meriah yang aman, damai dan Bersatu
5	Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang edukatif, islami, berkualitas, maju dan berkeadilan	Misi 1: Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai islami
6	Misi 6: Mewujudkan Bener Meriah yang lestari dan tangguh terhadap bencana	Misi 6: Mewujudkan Bener Meriah yang lestari dan tangguh terhadap bencana

Kerangka pikir *Smart City* Kabupaten Bener Meriah didasari oleh analisis masa depan, kesiapan daerah, dan kesenjangan yang diramu secara matang untuk melihat kesiapan daerah dalam mengadopsi konsep *Smart City* untuk diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Bener Meriah. Sama halnya dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, konsep *Smart City* menjadi salah satu faktor penting dari sebuah perencanaan strategis *Smart City* Kabupaten Bener Meriah. Dimana, di dalamnya memuat seluruh isu-isu strategis, tujuan, sasaran, kinerja utama, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, program-program inovasi rencana induk *Smart City* Kabupaten Bener Meriah telah disinkronisasi dengan program-program Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kabupaten Bener Meriah.

### **III. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY**

Makna kota pintar tidak lain adalah bentuk usaha untuk untuk menciptakan Kabupaten Bener Meriah sebagai kota layak huni yang semua fasilitas umumnya tercukupi agar mampu memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan demi meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Sebagai kabupaten madani, adaktif dan inovatif telah menjadikan nilai keunikan tersendiri untuk Kabupaten Bener Meriah dalam mengadopsi konsep *Smart City* yang selalu terintegrasi dengan konsep pembangunan syariahnya.

Terdapat enam dimensi pembangunan *Smart City* Kabupaten Bener Meriah yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*, dimana setiap dimensi terdiri dari 3 sub pilar dimensi masing-masing.

#### **3.1 Smart Governance**

*Smart Governance* dapat didefinisikan sebagai metode tata kelola kota yang cerdas yang di dalamnya terdapat berbagai upaya koordinasi, integrasi, perencanaan dan pengendalian pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga akan mewujudkan penguatan tata kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sampai tingkat paling bawah yaitu pemerintahan gampong. Selain itu, dalam dimensi smart governance juga dilakukan pengembangan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, pembangunan pondasi untuk integrasi semua dimensi *Smart City* dan juga membangun Sumber Daya Manusia (SDM) inovatif dan berkompeten dalam lingkup pemerintahan untuk mengurangi setiap kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

*Smart Governance* berkecimpung dalam 3 (tiga) area kerja dan 8 (delapan) indikator sebagai berikut:

1. Pelayanan publik
  - Pelayanan administrasi masyarakat
  - Layanan informasi public
  - Layanan sosial masyarakat
2. Manajemen Birokrasi yang efisien

- Akuntabilitas tata kelola e-birokrasi
  - Transparansi pemerintahan
  - Implementasi *e-government*
3. Manajemen kebijakan publik
- Partisipasi perencanaan public
  - Akses informasi publik

Tabel 4 Strategi Pembangunan Smart Governance

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Public Service</i>	Layanan publik yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi layanan untuk meningkatkan kinerja ASN serta menuju ke Satu Data</li> <li>2. Pengembangan aplikasi publik yang <i>user friendly</i></li> <li>3. Penerapan layanan dokumentasi dan informasi hukum</li> <li>4. Penerapan layanan yang memenuhi Standar Indeks Keamanan Informasi (KAMI)</li> </ol>
	Indeks kepuasan masyarakat dan dunia bisnis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas layanan publik</li> <li>2. Penerapan layanan pengaduan publik</li> <li>3. Pembangunan Mal Pelayanan terpadu satu atap yang melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan <i>stakeholder</i></li> </ol>
<i>Bureaucracy</i>	Indeks SPBE	Penerapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bener Meriah 2022-2026
	Peningkatan kinerja ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan secara menyeluruh tunjangan kinerja yang didukung dengan sistem e-kinerja</li> <li>2. Pengoptimalan kinerja pengawasan internal</li> </ol>
<i>Public Policy</i>	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrembang</li> <li>2. Mengkampanyekan cara bersosial media secara cerdas, sehat, anti diskriminasi dan bertanggung jawab</li> </ol>
	Meningkatkan masyarakat yang menggunakan layanan	Pelaksanaan publikasi/promosi yang selalu update terhadap layanan-layanan publik yang ada

### 3.2 Smart Branding

*Smart Branding* dapat diartikan sebagai *branding* (merek dangan) daerah yang pintar, dengan makna upaya untuk memasarkan daerah dengan cara yang inovatif sehingga mampu meningkatkan daya saingnya baik dalam lingkup lokal, nasional maupun Internasional. Terdapat tiga elemen yang dibebankan dalam pembangunan *Smart Branding*, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

Strategi utama dalam mewujudkan *Smart Branding* adalah dengan melakukan pengenalan *Branding* daerah, seperti membangun daya saing melalui pariwisata, bisnis dan wajah kota. Sektor pariwisata yang menjadi fokus utama Kabupaten Bener Meriah adalah sektor agrowisata. Pemilihan sektor agrowisata sendiri dilandaskan oleh ketersediaan lokasi agrowisata dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah

Pelaksanaan kepariwisataan Kabupaten Bener Meriah akan mengacu kepada Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020-2025. Dalam Qanun tersebut disebutkan bahwa strategi pembangunan destinasi pariwisata yakni pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) ekowisata Leuser dan KSPK Lanskap budaya Dataran Tinggi Gayo. Kedua adalah pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Budaya dan Arsitektural Tradisional Bukit-Bandar, KPPK Sejarah Pintu Rime Gayo-Timang Gajang, KPPK Agrowisata Permata-Bener Kelipah. Selanjutnya mengembangkan kecamatan Bukit sebagai pusat pelayanan primer pariwisata dan kecamatan Timang Gajah dan Mesidah sebagai pusat pelayanan sekunder yang merupakan lokasi konsentrasi usaha pariwisata berbasis masyarakat.

Strategi pemasaran daerah melalui *brand* daerah yang solid juga diperlukan sebagai panduan dalam penyusunan strategi, taktik, dan visualisasi *brand* kota. Melalui strategi *Smart Branding* diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi daerah. Perlu adanya panduan dalam peningkatan daya saing melalui strategi pemasaran di Era Digital sehingga investor dengan sendirinya akan datang. Membangun soft skill pelayanan prima untuk memperkuat branding daerah juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung *Smart City*.

Berikut strategi pembangunan *Smart Branding* Kabupaten Bener Meriah seperti terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 5 Strategi Pembangunan Smart Branding

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Tourism</i>	Berkembangnya Ekosistem Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) ekowisata Leuser dan KSPK Lanskap budaya Dataran Tinggi Gayo.</li> <li>2. Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Budaya dan Arsitektural Tradisional Bukit-Bandar, KPPK Sejarah Pintu Rime Gayo-Timang Gajang, KPPK Agrowisata Permata-Bener Kelipah.</li> <li>3. Pengembangan informasi wisata digital (berbasis TIK)</li> <li>4. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata</li> <li>5. Pengembangan strategi pemasaran baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional</li> <li>6. Mendorong masyarakat untuk kreatif di bidang ekonomi dan pariwisata</li> <li>7. Mendorong masyarakat untuk mengangkat potensi wilayahnya yang dapat memberikan dampak perekonomian</li> </ol>
<i>Business</i>	Berkembangnya Ekonomi Kreatif Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong semangat wirausaha melalui organisasi kepemudaan, komunitas pemuda dan pelajar</li> <li>2. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan</li> <li>3. Pengembangan kawasan wisata kuliner yang kaya rasa, kaya menu, nyaman dan aman</li> </ol>
<i>Appearance</i>	Terciptanya Wajah Kota Dengan Tata Ruang Yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan taman kota yang nyaman, aman dan layak bagi anak, pemuda dan lansia.</li> <li>2. Peningkatan layanan publik <i>wifi</i> yang mengedukasi user</li> <li>3. Pembuatan papan informasi nilai sejarah pada bangunan-bangunan kota pusaka</li> <li>4. Pengembangan pola navigasi wisata digital</li> </ol>

### 3.3 Smart Economy

*Smart Economy* adalah merupakan dimensi ketiga di dalam cakupan dimensi Smart City, dimana dimensi ini diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas perekonomian dan daya saing dari suatu kota. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menerapkan beberapa konsep *Smart Economy* dalam pengelolaan ekonominya, yaitu dengan menerapkan sistem penanaman modal dan perizinan online dibawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selain itu, Kabupaten Bener Meriah merupakan kota yang membuka lebar kesempatan bagi pebisnis untuk berinvestasi di daerah ini. Hal ini sangat didukung oleh situasi daerah yang sudah sangat aman dan kondusif, ditambah lagi kehidupan masyarakatnya yang lebih dinamis. Konsep pemerintahannya yang dilandasi oleh syariat Islam dan prinsip ekonominya menganut sistem perekonomian syariah telah memberikan warna yang berbeda dalam pengembangan *Smart Economy* Kabupaten Bener Meriah.

Oleh karena itu, penerapan konsep Smart Economy sangat diharapkan untuk mampu berperan dalam mewujudkan serta membantu mensukseskan misi pada RPJP Daerah. Pada prinsipnya, dengan tersedianya berbagai kemudahan yang mendukung kegiatan aktivitas ekonomi, tersedianya fasilitas infrastruktur pendukung dan tersedianya sistem pelayanan publik di bidang perizinan, penanaman modal, dan investasi yang lebih mudah, diharapkan akan membantu pemerintah dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang lebih baik serta dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga, secara tidak langsung akan menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bener Meriah.

Selain itu, pengaplikasian konsep *Smart Economy* ini juga bisa menjadi sarana untuk mendukung dan memfasilitasi industri yang sudah duluan ada di Kabupaten Bener Meriah menjadi lebih baik dan mampu menjadi daya tarik investasi untuk membuka peluang wirausaha-wirausaha baru yang lebih inovatif. Sehingga, dengan adanya hal tersebut akan berefek kepada lahirnya wirausahawan-wirausahawan muda yang lebih kompetitif.

Dalam mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran dan strategi pencapaian yang harus dibuat untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 6 Strategi Pembangunan Smart Economy

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Industry</i>	Terciptanya ekosistem industri pendukung <i>Smart City</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun ekonomi industri yang berdaya saing dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan daerah dan pengembangan usaha mikro.</li> <li>2. Membangun dan mengembangkan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan, sebagai pendukung <i>Smart City</i>.</li> <li>3. Mendorong pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bener Meriah sebagai pendukung industri 4.0</li> <li>4. Meningkatkan iklim investasi.</li> </ol>
<i>Welfare</i>	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan dan Peningkatan kualitas daripada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
<i>Transaction</i>	Penguatan tatanan ekonomi Syariah di dalam ekosistem pelayanan, pengelolaan dan transaksi keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat kelompok usaha dan koperasi Syariah.</li> <li>2. Peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah.</li> </ol>

### 3.4 Smart Living

Pengembangan hunian dan pola kehidupan cerdas dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada dasarnya dilaksanakan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Strategi umum yang diterapkan yaitu meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan dan transportasi kepada masyarakat. Kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, informasi dan pengetahuan hidup sehat dan berkualitas bagi masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola ruang terintegrasi yang memberikan kemudahan akses dan penyediaan sarana komunikasi publik terkait hal tersebut. Pengembangan hunian cerdas tentunya memiliki kaitan yang erat dengan bagaimana cara manusia bergerak dari satu poin ke poin selanjutnya. Terbatasnya wilayah, kapasitas jalan, dan tingginya volume kendaraan menjadi faktor pendorong utama bagi pemerintah dan swasta untuk bersama-sama bergerak dan membangun komitmen dalam menciptakan

layanan transportasi publik yang berkualitas yang dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam mobilitasnya. Strategi pembangunan *Smart Living* digambarkan pada Tabel berikut.

*Tabel 7 Strategi Pembangunan Smart Living*

<b>SUB PILAR DIMENSI</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>
<i>Harmony</i>	Terkendalinya Tata Ruang Kabupaten Bener Meriah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang.</li> <li>2. Pengembangan rencana kawasan di masa depan dengan desain terpadu dan berwawasan lingkungan.</li> <li>3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak</li> </ol>
<i>Health</i>	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan program yang mengarah pada perbaikan kesehatan masyarakat</li> <li>2. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan terpadu dari puskesmas, bidan, rumah sakit dan dokter praktek yang terintegrasi dan ramah anak.</li> <li>3. <i>Total Quality Management (TQM)</i> dan <i>Quality Assurance</i> pelayanan kesehatan</li> </ol>
<i>Mobility</i>	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum, Prasarana dan Sarana Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik</li> <li>2. Pengembangan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan transportasi <i>non-motorized</i></li> <li>3. Menerapkan kebijakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jam puncak di pusat kota dan pinggiran kota.</li> </ol>

### 3.5 Smart Society

*Society* atau masyarakat pada dasarnya dibangun dari individu-individu yang masing-masing memiliki ide, nilai moral dan etik, keyakinan, cara pandang, kebiasaan, dan pandangan masa depan yang sangat beragam. Dalam tatanan masyarakat cerdas, meningkatnya interaksi sosial masyarakat baik antar individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok harus mampu membentuk sebuah tatanan yang produktif secara positif.

Secara luas, *Smart Society* yang disatukan oleh teknologi digital melalui layanan pemerintah dan institusi swasta, dapat mendorong perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik secara sosial, ekonomi dan membantu pemerintah dan institusi swasta mencapai efektivitas layanannya. Hal tersebut dapat tercapai jika terjadi perkembangan tiga arah, di mana literasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam hal teknologi informasi dan komunikasi berada dalam level yang sama.

Sebagai aset serta subyek dari pembangunan sebuah kota, masyarakat harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Keamanan, keselamatan dan keberlangsungan hidupnya merupakan salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat membantu pemerintah dan lingkungan tempat mereka berada, masyarakat berhak mendapatkan informasi, pengetahuan dan peningkatan kemampuan mitigasi bencana dalam mengantisipasi dan menghadapi hal-hal kebencanaan yang berpotensi muncul dan menimpa diri, keluarga, harta serta lingkungan mereka. Pemuda, diyakini sebagai agen perubahan dalam sebuah kota perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk diberdayakan dan dikembangkan karena pemuda pun diyakini sebagai sumber inovasi dan kreativitas.

Kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan perlu mendapat dukungan penelitian dan pengembangan di mana keterlibatan aktif masyarakat dibangun dengan semangat keterbukaan dan kerja sama. Strategi pembangunan *Smart Society* Kabupaten Bener Meriah dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 8 Strategi Pembangunan Smart Society

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Community</i>	Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kerja sama dengan institusi pendidikan dan akademisi terkait dengan pengabdian masyarakat</li> <li>2. Penguatan lembaga masjid/meunasah</li> <li>3. Pemenuhan kebutuhan kaum difabel</li> <li>4. Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> <li>5. Pelatihan usaha- usaha kreatif kepada masyarakat dan bekerja sama dengan melibatkan <i>stakeholder</i></li> <li>6. Pembangunan/pengembangan sarana/prasarana ibadah di perkantoran dan pasar</li> </ol>
<i>Learning</i>	Meningkatnya Literasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan program yang mengarah kepada Pengembangan metodologi <i>e-learning</i> bagi anak usia dini, SD, SMP dan SMA</li> <li>2. Peningkatan kesadaran pemanfaatan internet secara positif dan produktif serta penguatan sosialisasi qanun dan penyuluhan agama islam menggunakan pendekatan TIK</li> <li>3. Penguatan peran pemuda sebagai duta baca di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing</li> </ol>
<i>Security</i>	Meningkatnya Layanan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan dan pengembangan Desa siaga bencana</li> <li>2. Penguatan komunitas berbasis <i>security</i> dalam menghadapi ancaman-ancaman terkait keamanan data</li> <li>3. Peningkatan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana</li> <li>4. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebencanaan</li> <li>5. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kedaruratan yang efisien, efektif dan responsif</li> </ol>

### 3.6 Smart Environment

Pengembangan lingkungan kota yang cerdas melalui pengelolaan sumber daya lingkungan menuntut strategi yang kuat dan mulai bergerak untuk memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang setiap saat. Mengembangkan jaringan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan antara pemerintah, swasta, masyarakat dan

kalangan akademisi sangatlah penting dalam memberi kekuatan dan daya dorong dalam upaya mengembangkan pengelolaan lingkungan udara dan air perkotaan berbasis teknologi.

Hal tersebut berlaku juga dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan hasil kegiatan perkotaan terkait dengan tingginya produksi sampah dan limbah dalam sebuah ekosistem kota. Pendekatan *zero waste* berbasis teknologi, penerapan konsep daur ulang dan skema circular economy berbasis sampah/limbah merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan.

Menyadari akan potensi berkurangnya sumber energi dunia berbasis fosil dan komitmen dunia untuk menekan tingkat polusi yang ditujukan untuk menghambat pemanasan global, mendorong dan memberi daya ubah bagi manusia untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, dengan mendorong seluruh potensi yang dimiliki kota.

*Tabel 9 Strategi Pembangunan Smart Environment*

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Protection</i>	Meningkatnya Proteksi Terhadap Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memelihara, mengelola dan mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik agar fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan estetisnya tetap terjaga.</li> <li>2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai sistem penyangga kehidupan</li> </ol>
<i>Waste</i>	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (3R)</li> <li>2. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan program 3R</li> <li>3. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian dan perdagangan.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan.</li> <li>5. Mendorong masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi melalui pendekatan <i>circular economy</i></li> <li>6. Meningkatkan ketersediaan septic tank komunal pada daerah kumuh dan daerah terindikasi</li> </ol>

<b>SUB PILAR DIMENSI</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>
<i>Energy</i>	Terciptanya Tata Kelola Energi Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan penggunaan tenaga surya pada sarana umum Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kedaruratan yang efisien, efektif dan responsive

## **IV. PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY**

### **4.1 Rencana Aksi**

Pada tahapan rencana aksi *Smart City* merupakan tahapan awal dari suatu upaya perubahan yang sistematis. Perencanaan perubahan tersebut berawal dari masalah yang jelas dan spesifik sehingga diharapkan mampu menciptakan rencana-rencana yang memiliki tolak ukur keberhasilan yang pasti. Oleh karena itu, rencana aksi *Smart City* Kabupaten Bener Meriah disusun dengan menggunakan prinsip:

1. *Specific* (spesifik)
2. *Measureable* (terukur)
3. *Achievable* (dapat dicapai)
4. *Realistic* (realistik)
5. *Timebound* (batas waktu)

Dalam rencana aksi ini, ditetapkan program prioritas dari berbagai sasaran atau tujuan utama yang bertujuan untuk menjawab *problem statement*, aktivitas, objektif, hingga tugas-tugas (*tasks*) atau eksekusi kegiatan-kegiatan yang perlu dan akan dilakukan terkait perubahan yang akan dilakukan. Rencana aksi *Smart City* dibagi dalam 4 (empat) rencana, yaitu:

1. Pengembangan kebijaksanaan dan kelembagaan *Smart City* Kabupaten Bener Meriah
2. Rencana pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* Kabupaten Bener Meriah
3. Rencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *Smart City* Kabupaten Bener Meriah
4. Rencana penguatan literasi *Smart City* Kabupaten Bener Meriah

#### **4.1.1 Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City Kabupaten Bener Meriah**

##### **1. Kebijakan**

Perencanaan kebijakan adalah salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitu pun dengan inisiatif *Smart City* yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Untuk itu, saat ini Bupati

Bener Meriah telah menerbitkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Selain itu, Bupati akan segera membentuk dan menetapkan Dewan Smart City Kabupaten Bener Meriah, kemudian target selanjutnya adalah pembuatan kebijakan terkait penyelenggaraan Smart City dengan menyesuaikan arah kebijakan Kabupaten Bener Meriah..

Berdasarkan arah kebijakan Kabupaten Bener Meriah tahun 2023-2026, meskipun belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan Smart City di Kabupaten Bener Meriah, saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis TIK diatur mengikuti Buku Perencanaan Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021-2025. Perangkat aturan tersebut diharapkan mampu menjadi sarana dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta mampu mendorong lahirnya aturan tentang penyelenggaraan Smart City di Kabupaten Bener Meriah. Saat ini masterplan Smart City dan Peraturan Bupati yang mengatur penyelenggaraan Smart City Bener Meriah sedang dalam proses penyusunan oleh Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Bener Meriah. Kepastian terhadap keberlanjutan program Smart City dalam jangka panjang di Kabupaten Bener Meriah tentunya tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bener Meriah 2023-2026.

Tabel 10 Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan Smart City Kabupaen Bener Meriah

<b>Kegiatan Rencana Aksi</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>	<b>OPD Penanggung Jawab</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Tahun</b>
Pengembangan kebijakan Bener Meriah Smart City	Peningkatan kualitas layanan publik	Peraturan Daerah	Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah	<i>Smart Governance</i>	2023
Penyusunan kebijakan kependudukan	Peningkatan kualitas layanan publik	Revisi Qanun kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bener Meriah	<i>Smart Governance</i>	2023
Penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Pengembangan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Jumlah dokumen kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	<i>Smart Society</i>	2023
Kegiatan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Pengembangan rencana kawasan di masa depan dengan desain terpadu dan berwawasan lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang rinci	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawawasan Permukiman Bener Meriah	<i>Smart Living</i>	2023

## 2. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan perangkat non-fisik selanjutnya setelah kebijakan yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan *Smart City* di daerah dari sisi pengelola kota. Setiap perangkat daerah terlibat dalam Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* yang dilengkapi dengan kewenangan tugas/fungsi sebagai berikut:

### a. Dewan *Smart City*:

1. Memberikan arahan strategis pengembangan *Smart City* sesuai dengan visi, misi dan perkembangan kebutuhan.
2. Memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana induk *Smart City*, rencana kerja dan inisiatif pengembangan *Smart City*.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan dan implementasi *Smart City*.

### b. Tim Pelaksana *Smart City*:

1. Memberikan usulan program dan kegiatan pembangunan *Smart City* dalam sektor tertentu maupun lintas sektor.
2. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan *Smart City* dalam sektor tertentu maupun lintas sektor secara terkoordinasi melalui kajian kebutuhan, perencanaan, perancangan, pembangunan, implementasi, monitoring dan evaluasi.
3. Menindaklanjuti arahan dewan *Smart City*.
4. Merumuskan inisiatif inovasi terkait *Smart City* di berbagai sektor/perangkat daerah dan mengusulkan kepada dewan *Smart City* untuk arahan dan persetujuan.
5. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan dan implementasi *Smart City* secara terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektor (lintas perangkat daerah).
6. Melaporkan hasil kegiatan perencanaan, pengembangan dan implementasi *Smart City* kepada dewan *Smart City*.
7. Memfasilitasi forum-forum dan bentuk program lain yang mewadahi partisipasi pelaku usaha, komunitas dan masyarakat luas.
8. Melakukan koordinasi kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan *Smart City*.

9. Membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pengembangan *Smart City*.

Dengan dibentuknya Dewan *Smart City* yang terdiri dari berbagai elemen baik pemerintahan, akademisi, swasta dan masyarakat Kabupaten Bener Meriah telah memiliki cikal bakal pembentukan forum *Smart City* agar pelaksanaannya berkelanjutan dan timbul semangat ingin memajukan Kabupaten Bener Meriah. Namun perlu adanya penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP) Smart City* agar program tersebut terus berjalan dan terpantau. SOP dengan sendirinya akan menggerakkan semua elemen untuk melakukan tugasnya terhadap program *Smart City* yang akan dibangun. Bila perlu dibuatkan tim khusus dengan tupoksi khusus untuk menjalankan program *Smart City*.

Disamping aspek kebijakan dan kelembagaan, terdapat satu aspek non-fisik selanjutnya yang akan menjadi penentu dari keberlanjutan *Smart City* di daerah. Aspek tersebut adalah aspek organisasi di masyarakat sipil. Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan *Smart City* karena di dalam sebuah *Smart City*, aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari *Smart City*.

Di Kabupaten Bener Meriah terdapat perguruan tinggi yang terdekat dengan kabupaten tersebut yakni IAIN Gajah Putih Takengon dan Universitas Gajah Putih Takengon. Dari beberapa perguruan tinggi tersebut, IAIN Gajah Putih Takengon dan Universitas Gajah Putih Takengon memiliki lembaga pengabdian masyarakat dan telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta direncanakan akan dilibatkan dalam tim pelaksana *Smart City* Kabupaten Bener Meriah. Selain itu, adanya forum-forum swadaya masyarakat yang tergabung dalam komunitas-komunitas baik itu komunitas bergerak dalam bidang startup maupun bisnis, hobi dan profesi secara nyata telah mendorong *Smart City* ke arah tatanan implementatif.

Tabel 11 Rencana Aksi Pengembangan Kelembagaan Smart City Kabupaten Bener Meriah

<b>Kegiatan Rencana Aksi</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>	<b>OPD Penanggung Jawab</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Tahun</b>
Pembentukan organisasi fungsional yang merumuskan Kebijakan Umum <i>Smart City</i>	Peningkatan kualitas layanan publik	Dewan <i>Smart City</i> Bener Meriah	Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah	<i>Smart Governance</i>	2023
Pembentukan organisasi sebagai pelaksana Bener Meriah <i>Smart City</i>	Peningkatan kualitas layanan publik	Tim Teknis <i>Smart City</i> Bener Meriah	Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah	<i>Smart Governance</i>	2023
Pembentukan organisasi forum Bener Meriah <i>Smart City</i>	Penguatan peran serta kepemudaan, komunitas dan perempuan dalam kegiatan sosial	Terbentuknya forum <i>Smart City</i>	Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah	<i>Smart Society</i>	2023

#### 4.1.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City*

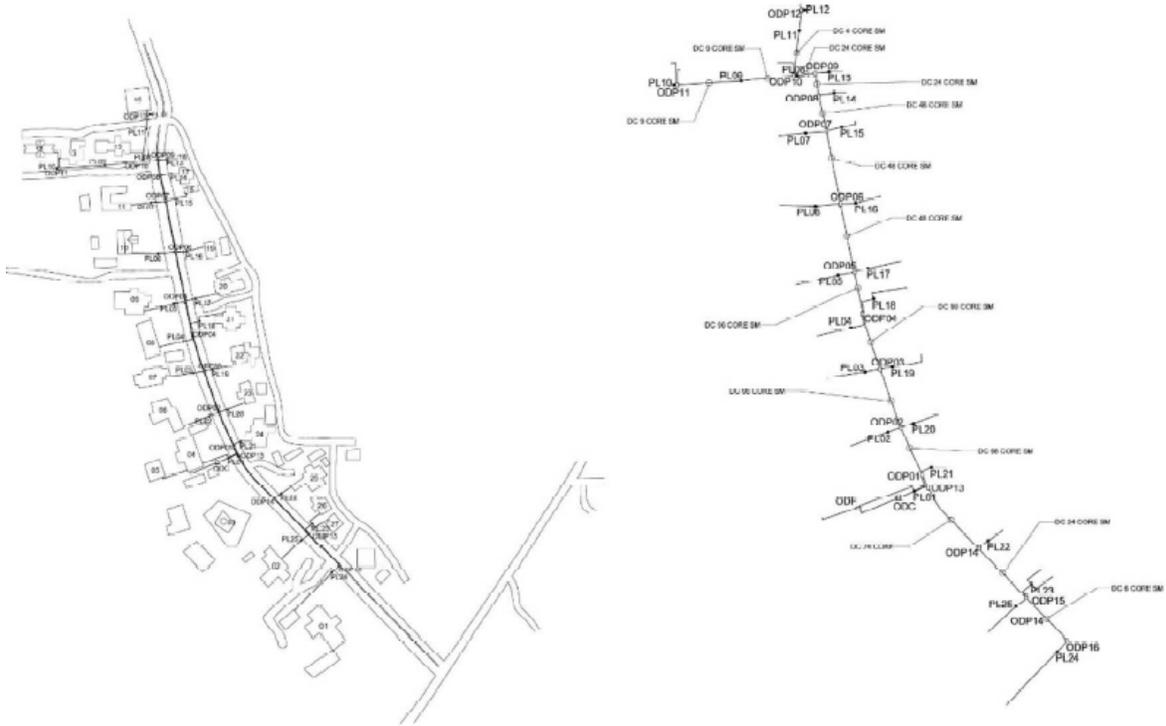
Dalam rangka menunjang implementasi *Smart City* serta meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Bener Meriah harus di dukung dengan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai, salah satu infrastruktur yang sangat penting saat ini adalah Infrastruktur untuk komunikasi data, *voice* dan video. Tidak ada teknologi lagi yang bisa kita gunakan secara baik yaitu dengan teknologi media kabel *Fiber Optic* (FO). *Fiber Optic* memiliki lebar pita frekwensi (*bandwith*) yang lebar, frekuensi *fiber optic* sekitar 1013 hingga 1016 Hz hal ini mendeteksi sinar infra merah, Bekerja pada daerah frekuensi tinggi maka jumlah informasi yang dibawa akan lebih banyak sehingga dapat menyalurkan informasi dengan kecepatan sangat tinggi.

Dengan kemampuan *fiber optic* dalam menyalurkan sinyal frekuensi tinggi sangat cocok dengan pengiriman sinyal digital pada sistem multipleks digital dengan kecepatan dari beberapa Mb/s (*Megabit per Second*) hingga Gb/s (*Gigabit per Second*), diameter kabel *fiber optic* lebih kecil dibandingkan dengan kabel tembaga dan juga lebih ringan, Redaman kecil sehingga ruas pengulang menjadi lebih panjang.

Perkembangan serat optik saat ini telah menghasilkan produksi dengan redaman yang sangat rendah dibandingkan dengan kabel yang terbuat dari tembaga, Aman dari bahaya listrik. Terbuat dari kaca atau plastik sehingga tidak dapat dialiri arus listrik sehingga terhindar terjadinya hubungan pendek, Tahan temperature tinggi. Bahan *silica* mempunyai titik leleh kira-kira 1900° C dan ini sangat jauh diatas titik leleh tembaga hingga cocok dipergunakan pada daerah yang rawan terhadap temperature tinggi.

Secara empiris, apabila infrastruktur *fiber optic* ini sudah di implementasikan terutama untuk koneksi *government to government* (G to G) dapat mendorong aktivitas sosial dan ekonomi secara paralel di karenakan pelayanan publik yang sudah optimal. Bahkan apabila infrastruktur *fiber optic* ini di dimanfaatkan oleh pihak swasta atau kalangan dunia usaha dari aspek ekonomi, yang diuntungkan tidak saja pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, beberapa aplikasi terkait *e-government* yang memiliki proses yang kompleks membutuhkan jalur pengiriman data yang besar agar informasi yang diperlukan itu harus dapat diperoleh dengan cepat dan akurat.

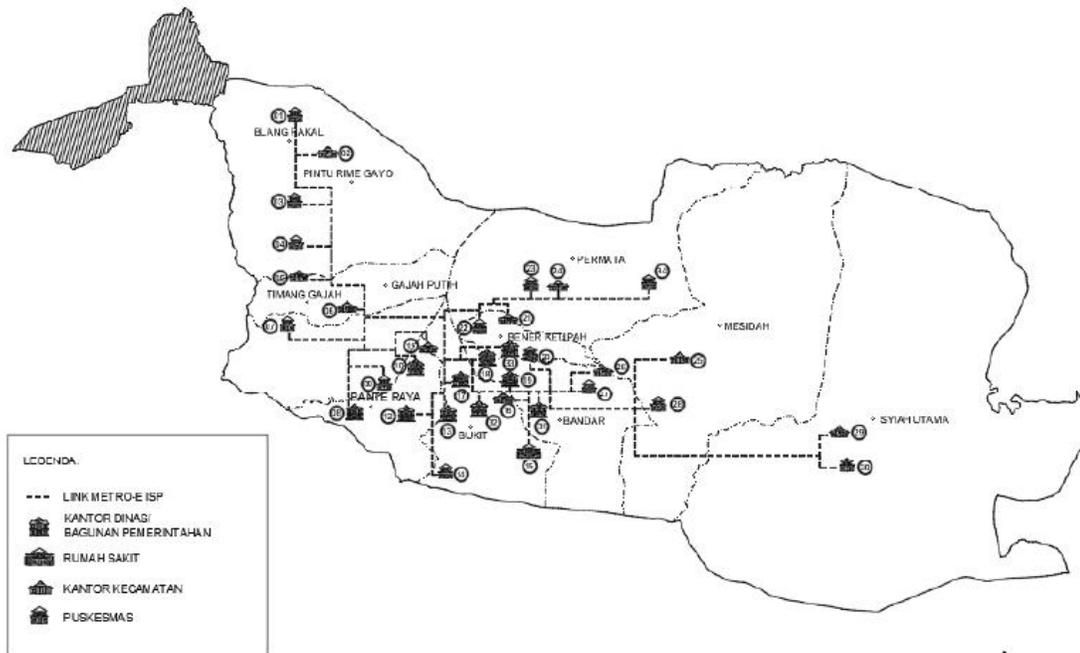
Saat ini sudah tersedia dokumen *Detail Engineering Design* (DED) atau perencanaan pembangunan infrastruktur jaringan *fiber optic* di Kabupaten Bener Meriah. Rencana jalur jaringan FO kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1 Data Peta Penyebaran Jaringan Intranet FO Kabupaten Bener Meriah

Gambar 1 merupakan *diagram-logic* penyebaran jaringan Intranet FO Kabupaten Bener Meriah. Metode *direct link* dan metode *Metro Ethernet* (Metro-E) adalah solusi untuk jaringan FO di kabupaten Bener Meriah. Metro Ethernet merupakan kependekan dari *metropolitan-area Ethernet*. Perangkat ini merupakan jaringan *Metropolitan-area Network* (MAN) berbasis standar Ethernet yang jangkauannya lebih luas. Secara sederhana hal ini bisa dipahami sebagai sebuah teknologi Ethernet dengan cakupan yang lebih luas. Pada praktiknya Metro Ethernet bahkan bisa mencakup satu wilayah kota besar seperti Jakarta atau Surabaya.

Untuk wilayah-wilayah yang jauh dari *central main link* (yang menggunakan metode *direct link*) menggunakan metode *Metro Ethernet* (Metro-E) yang dianggap paling sesuai untuk kebutuhan pengembangan jaringan *e-Government* untuk kabupaten Bener Meriah karena dinilai dapat mengefisiensikan nilai investasi pengimplementasian jaringan *fiber optic* kabupaten Bener Meriah. Metode Metro-E ini memungkinkan pengembangan seluas-luasnya untuk setiap SKPK di kabupaten Bener Meriah.



Gambar 2 Data Peta Penyebaran Jaringan Intranet FO Metro-E Pemkab Bener Meriah

Tabel 12 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City Kabupaten Bener Meriah

<b>Kegiatan Rencana Aksi</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>	<b>OPD Penanggung Jawab</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Tahun</b>
Pembangunan Data Center Terintegrasi <i>Smart City</i>	Peningkatan kualitas integrasi layanan data	Perencanaan Gedung <i>Data Center</i>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<i>Smart Governance</i>	2023
Pembangunan Mall Pelayanan Terpadu 1 (Satu) atap yang melibatkan semua OPD, Kepolisian dan Stakeholder	Peningkatan kualitas layanan publik	Perencanaan Mall Pelayanan Terpadu 1 (Satu) atap yang melibatkan semua OPD, Kepolisian dan Stakeholder	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	<i>Smart Governance</i>	2023
Optimalisasi Jaringan Telekomunikasi	Peningkatan kualitas integrasi layanan data	Jumlah koneksi jaringan antar OPD	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik,	<i>Smart Governance</i>	2023

#### 4.1.3 Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung *Smart City*

Aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak program komputer yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengerjakan pekerjaan. Di bidang pemerintahan, aplikasi komputer digunakan pegawai untuk mengolah data dan informasi, memberikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif, dan menyajikan transparansi di dalam sebuah instansi. Aplikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah umumnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan seperti aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Powerpoint. Aplikasi ini memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh penyedia aplikasi sehingga perlu dilakukan perpanjangan baik setiap tahun atau periode tertentu. Disisi lain, aplikasi khusus merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh sebuah lembaga atau instansi untuk keperluan tertentu misalnya aplikasi manajemen pegawai, aplikasi keuangan dan aplikasi pengadaan secara elektronik. Berdasarkan hasil dokumen SPBE bahwa hampir seluruh OPD di Kabupaten Bener Meriah menggunakan aplikasi umum dan aplikasi khusus. Selain itu, seluruh aplikasi yang digunakan di setiap OPD di Kabupaten Bener Meriah sudah berlisensi resmi.

Pengembangan atau pengadaan layanan aplikasi yang dilakukan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah belum keseluruhan dilakukan berdasarkan metodologi *System Development Life Cycle (SDLC)*. Diperlukan survei detail untuk ini yang mencakup:

- Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain
- Beberapa aplikasi yang dibuat telah disusun desain detail software aplikasi, termasuk juga di sini *data flow diagram*, *entity relationship diagram* dan pengendalian aplikasi (*application control*) yang memungkinkan setiap pemrosesan yang akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security control*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek: kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*) yang termuat dalam kerangka acuan kerja.
- Implementasi desain detail dan teknis ke dalam kode program (*coding*)
- Beberapa software aplikasi yang dibuat telah melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*)

- Uji coba (*testing*): *unit testing, system testing, integration testing, User Acceptance Test*
- Instalasi dan akreditasi

Selanjutnya untuk pembuatan aplikasi atau software dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah harus mendapat rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah. Untuk itu Dewan TIK harus membuat *flowchart* untuk proses tersebut. Setiap aplikasi yang direalisasikan di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah harus disertai beberapa hal yakni:

- Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC
- Manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi
- Materi transfer pengetahuan dan materi training
- Training atau transfer pengetahuan kepada pengguna dan administrator sistem

Pembangunan sistem informasi di Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah masih ada yang saling terpisah dan tidak terintegrasi. Sistem yang dibangun dengan teknologi tertutup (*closed-source*) dan tidak sedikit pula yang dibangun tanpa menggunakan skema database terstandar sehingga sangat sulit untuk diintegrasikan dengan sistem lain. Untuk itu diperlukan kerangka kerja (*framework*) dan aplikasi yang bisa menerapkan interoperabilitas dari setiap sistem informasi yang ada pada masing-masing SKPD agar pengelolaan informasi bisa lebih efisien dan efektif. Dengan penerapan aplikasi ini, diharapkan dapat diambil manfaatnya pada sistem informasi yang sedang dikembangkan maupun yang sudah berjalan. Usaha untuk mengintegrasikan data sistem informasi dari sumber informasi lainnya yang heterogen baik dari sisi spesifikasi perangkat lunak, perangkat keras, atau format data dapat diwujudkan tanpa perlu mengubah secara keseluruhan sistem yang ada serta tidak perlu membangun aplikasi terpusat dengan biaya yang tidak sedikit.

Tabel 13 Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi dan Software Pendukung

<b>Kegiatan Rencana Aksi</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Tahun</b>
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi ( <i>E-Government</i> )	Pengembangan aplikasi publik yang <i>user friendly</i>	Persentase terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasis TIK dan masyarakat dapat terlayani secara elektronik	Dinas Komunikasi Informatika	<i>Smart Governance</i>	2023
Sinkronisasi Aplikasi Pengelolaan <i>Smart City</i> dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Peningkatan kualitas layanan satu data	Aplikasi Pengelolaan <i>Smart City</i> yang terintegrasi dengan aplikasi sipk	Dinas Komunikasi Informatika, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (BPKPA)	<i>Smart Governance</i>	2023
Aplikasi Layanan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Terpadu	Pengoptimalan kinerja pengawasan internal	Tersedianya Aplikasi Layanan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Terpadu	Dinas Komunikasi Informatika, Dinas Lingkungan Hidup	<i>Smart Environment</i>	2023
Aplikasi <i>Agro Tourism E-Map</i>	Pengoptimalan Lokasi Destinasi Wisata Agro Bener Meriah	Tersedianya aplikasi <i>Agro Tourism E-Map</i>	Dinas Komunikasi Informatika, Dinas Pariwisata	<i>Smart Branding</i>	2023
Pengembangan sistem informasi peta potensi unggulan daerah	Mendorong masyarakat untuk mengangkat potensi wilayahnya	Jumlah potensi daerah yang tersedia	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)	<i>Smart Branding</i>	2023

<b>Kegiatan Rencana Aksi</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Tahun</b>
Aplikasi Sistem Informasi retribusi parkir	Peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan pendapatan daerah	Tersedianya aplikasi terkait retribusi parkir	Dinas Perhubungan	<i>Smart Economy</i>	2023
Pengembangan aplikasi <i>e-health</i>	Pengembangan program perbaikan kesehatan masyarakat	Tersedianya pelayanan kesehatan berbasis elektronik di puskesmas	Dinas Kesehatan	<i>Smart Living</i>	2023
Pengembangan sistem informasi manajemen sekolah	Pengembangan program Pengembangan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti diklat Teknologi Informasi Komputer (TIK)	Dinas Pendidikan Bener Meriah	<i>Smart Society</i>	2023

Tabel 14 Layanan Aplikasi Yang Digunakan pada OPD Kabupaten Bener Meriah

No.	Jenis Aplikasi	Nama Aplikasi	Keterangan
1.	Pengaduan	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)	<a href="https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-bener-meriah">https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-bener-meriah</a>
2.	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	<a href="http://lpse.benermeriahkab.go.id/eproc4">http://lpse.benermeriahkab.go.id/eproc4</a>
3.	Informasi Gampong	Gampong Database (GPDB)	Database Website Gampong <a href="https://gpdb.acehprov.go.id">https://gpdb.acehprov.go.id</a>
4.	Katalog Data Hukum	Jaringan Data Informasi Hukum	Jaringan Data Informasi Hukum <a href="https://jdih.benermeriahkab.go.id/">https://jdih.benermeriahkab.go.id/</a>
5.	Penilaian ASN Bener Meriah	Penilaian Kinerja PNS dan SKPK	Aplikasi Penilaian Kinerja <a href="https://ekinerja.benermeriahkab.go.id/index.php">https://ekinerja.benermeriahkab.go.id/index.php</a>
6.	Informasi Publik (Satu Data)	PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi <a href="https://ppid.benermeriahkab.go.id/">https://ppid.benermeriahkab.go.id/</a>
7.	Informasi Gampong Kabupaten Bener Meriah	Sistem Informasi Gampong (SIGAP)	Sistem Informasi Gampong <a href="https://benermeriah.sigapaceh.id/seuramo/daftar_kecamatan/">https://benermeriah.sigapaceh.id/seuramo/daftar_kecamatan/</a>

#### 4.1.4 Rencana Penguatan Literasi Smart City Kabupaten Bener Meriah

Tabel 15 Rencana Aksi Penguatan Literasi

Kegiatan rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Sosialisasi/Seminar/ <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) /Penyuluhan					
Sosialisasi dan literasi kepada aparatur terkait dalam Perencanaan Penyiapan RPJMG di Gampong	Pengoptimalan kinerja pengawasan internal	Persentase penyelesaian RPJMG dan RKPG di Gampong yang tepat waktu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	<i>Smart Government</i>	2023
Sosialisasi kepada aparatur desa terkait sistem keuangan desa	Pengoptimalan kinerja pengawasan internal	Jumlah gampong yang menerapkan sistem keuangan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	<i>Smart Government</i>	2023
Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pengoptimalan kinerja pengawasan internal	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	<i>Smart Government</i>	2023
Sosialisasi berbagai peraturan	Pengoptimalan kinerja	Jumlah Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	<i>Smart</i>	2023

<b>Kegiatan rencana Aksi</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>	<b>OPD Penanggung Jawab</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Tahun</b>
pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	pengawasan internal	yang mentaati norma umum dan norma K3	dan Transmigrasi	<i>Government</i>	
Dakwah Warung Kopi (Tausyiah dan Nasyid)	Peningkatan literasi masyarakat muda terkait syariah islam	Jumlah pengunjung yang mendengar dakwah	Dinas Syariat Islam	<i>Smart Branding</i>	2023
Workshop/seminar bisnis promosi UMKM	Pengembangan dan Peningkatan kualitas daripada BUMG dan UKM/IKM	Jumlah peserta workshop/seminar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<i>Smart Economy</i>	2023
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Pengembangan program yang mengarah pada perbaikan kesehatan masyarakat	Jumlah sarana inspeksi kesehatan lingkungan	Dinas Kesehatan	<i>Smart Living</i>	2023
Kegiatan sosialisasi rencana tata ruang/tata kota	Pengembangan rencana kawasan di masa depan dengan desain terpadu dan berwawasan lingkungan	Jumlah lokasi terlaksananya sosialisasi penataan ruang dan bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<i>Smart Living</i>	2023
Sosialisasi kepada guru, murid serta wali murid mengenai sistem pendidikan berbasis teknologi	Pengembangan metodologi E-Learning bagi anak usia dini, SD, SMP	Jumlah sekolah yang menerapkan proses evaluasi dan penilaian berbasis TIK	Dinas Pendidikan	<i>Smart Society</i>	2023
Sosialisasi norma, standar,	Peningkatan pengetahuan		Badan	<i>Smart Society</i>	2023

<b>Kegiatan rencana Aksi</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>	<b>OPD Penanggung Jawab</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Tahun</b>
pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran kepada badan usaha	dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebencanaan	Jumlah norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran yang disosialisasi	Penanggulangan Bencana Daerah		
Melakukan edukasi tentang Qanun Jinayah kepada masyarakat	Peningkatan literasi masyarakat terhadap qanun jinayah	Penurunan angka pelanggaran terhadap qanun syariah islam	SATPOL PP dan WH	<i>Smart Society</i>	2023
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan literasi masyarakat terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan anak dan perempuan	Jumlah gugus tugas perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat yang terbentuk	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	<i>Smart Society</i>	2023
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Penataan informasi kependudukan	Buku Profil Informasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<i>Smart Governance</i>	2023
<b>Bimbingan Teknis/Pelatihan</b>					
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah (Statistik Survey Sektoral)	Integrasi layanan terutama <i>government to citizen</i> dan <i>government to business</i> serta juga <i>government to government</i> dan <i>government to employee</i>	Persentase terpenuhinya database statistik daerah	Dinas Komunikasi Informatika	<i>Smart Governance</i>	2023

<b>Kegiatan rencana Aksi</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>	<b>OPD Penanggung Jawab</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Tahun</b>
	untuk meningkatkan kinerja ASN serta menuju ke Satu Data				
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pengoptimalan kinerja pengawasan internal	Jumlah diklat substansif yang diikuti oleh APiP	Inspektorat	<i>Smart Governance</i>	2023
Peningkatan kualitas aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengoptimalan kinerja pengawasan internal	Jumlah staf terlatih	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<i>Smart Governance</i>	2023
Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Mendorong Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Bener Meriah sebagai pendukung industri 4.0	Jumlah pengrajin yang ikut pelatihan souvenir dan yang diberi bantuan peralatan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	<i>Smart Economy</i>	2023
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry	Membangun dan mengembangkan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan, sebagai pendukung <i>Smart City</i>	Jumlah perajin yang ikut pelatihan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	<i>Smart Economy</i>	2023
Bimbingan Hukum Keluarga (Ahwalusy Syakhsiyah) dan Pembinaan Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah	Pengembangan program yang mengarah pada perbaikan kesehatan masyarakat	Jumlah Peserta Pembinaan Hukum Keluarga	Dinas Syariat Islam	<i>Smart Living</i>	2023

<b>Kegiatan rencana Aksi</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>	<b>OPD Penanggung Jawab</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Tahun</b>
Pembinaan Keluarga Berencana	Pengembangan program yang mengarah pada perbaikan kesehatan masyarakat	Jumlah pembinaan gampong KB yang dilaksanakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	<i>Smart Living</i>	2023
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran kepada masyarakat dan siswa sekolah	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebencanaan	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran yang dilaksanakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<i>Smart Society</i>	2023
Membuat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Peningkatan pengetahuan kebencanaan	Jumlah pelaksanaan forum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<i>Smart Society</i>	2023
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Pemberdayaan masyarakat penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah Anak Asuh Panti Asuhan/Jompo yang Mendapat Pelatihan	Dinas Sosial	<i>Smart Society</i>	2023
Pelayanan Kie Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Gelandangan dan Pengemis Mendapat Pembinaan	Dinas Sosial	<i>Smart Society</i>	2023

## 4.2 Road Map Smart City

Pada bagian ini akan menjelaskan peta jalan (*road map*) implementasi program pembangunan *Smart City* merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam mewujudkan rencana induk (*master plan*) *Smart City* menjadi pelaksanaan pembangunan. Peta jalan (*road map*) pengembangan *Smart City* terbagi dalam 3 (tiga) fase yaitu:

1. Pengembangan Jangka Pendek. Perencanaan pengembangan *Smart City* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan periode yang dimulai dari 2022 sampai 2032.
2. Pengembangan Jangka Menengah. Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, pada periode 2022 sampai tahun 2026.
3. Pengembangan Jangka Panjang. Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan, pada periode 2022 sampai tahun 2032

Selanjutnya pada sub bab selanjutnya akan digambarkan secara detail strategi yang akan digunakan, program/inovasi, anggaran yang dibutuhkan, pelaksana kegiatan, dimensi yang termuat dalam *Smart City*, indikator keberhasilan dari program yang dijalankan dan target capaian untuk masing-masing periode yakni fase program jangka pendek, fase program jangka menengah dan fase program jangka panjang.

Pada bagian akhir *road map* pengembangan *Smart City* Kabupaten Bener Meriah juga akan disebutkan program kegiatan *Quick Win* pada fase jangka pendek 2022-2023. Program *Quick Win* akan memuat semua sub dimensi pada dimensi *Smart City*.

#### 4.2.1 Fase Program Jangka Pendek (Tahun 2022-2023)

Tabel 16 Fase Program Jangka Pendek (Tahun 2022-2023)

No	Strategi	Program/Inovasi	Pagu Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian	
							2022	2023
1	Penggunaan Tanda Tangan Elektronik	Mensosialisasikan Aplikasi SRIKANDI	60.000.000	Dinas Komunikasi Informatika	Smart Governance	Jumlah SKPK yang menggunakan Aplikasi		√
2	Mensinergikan perencanaan pembangunan berbasis TIK dan pengembangan Bener Meriah Big Data	Indeks Kepuasan Masyarakat, Layanan Aduan Online	150.000.000	DPMPTSP	Smart Governance	Laporan Pengaduan Masyarakat		√
		Musrembang Online	200.000.000	BAPPEDA	Smart Governance	Jumlah Kecamatan Yang Menggunakan Musrembang Online		√
		Bener Meriah Satu Data	90.000.000	Dinas Komunikasi Informatika	Smart Governance	Tersampainya semua Informasi dari Masyarakat		√
3	Meningkatkan Sinergitas antar dinas dan lembaga Vertikal dalam menjaga stabilitas keamanan	Monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Smart Governance	Laporan Monitoring dan Evaluasi orang asing/Tenaga Kerja Asing (TKA)		√
4	Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Cerdas	Integrasi Data Web GIS, diantaranya terkait dengan kondisi jalan, sarana pengairan, lokasi sekolah, fasilitas kesehatan,	75.000.000	BAPPEDA	Smart Governance	Tersedianya Web GIS yang terintegrasi		√

No	Strategi	Program/Inovasi	Pagu Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian	
							2022	2023
		pemerintahan dan social						
5	Pengembangan Sistem Informasi Layanan Administrasi Kepegawaian guna mempermudah proses kenaikan pangkat	Pengembangan Aplikasi Kepegawaian	150.000.000	BKPSDM	<i>Smart Governance</i>	Jumlah Pegawai yang Melakukan Kenaikan Pangkat		√
6	Memaksimalkan penggunaan Aplikasi kenaikan gaji berkala bagi pegawai daerah	Pengembangan Aplikasi Superkagala	150.000.000	BKPSDM	<i>Smart Governance</i>	Jumlah Pegawai yang Melakukan Kenaikan Gaji Berkala		√
7	Pengembangan Agrowisata Kuliner, Alam, Sejarah, Edukasi dan Budaya berbasis Digital dan Pesona Branding	Pengembangan Aplikasi Bener Meriah Agrowisata	90.000.000	Dinas Pariwisata	<i>Smart Branding</i>	Tersedianya aplikasi <i>Bener Meriah Agrowisata berbasis mobile</i>		√

#### 4.2.2 Fase Program Jangka Menengah (Tahun 2022-2026)

Tabel 17 Fase Program Jangka Menengah (Tahun 2022-2026)

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya interaksi sosial masyarakat	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Smart Society	Persentase tersedianya data organisasi kemasyarakatan	√	√	√	√	√
2	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebencanaan	Membuat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	550.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Smart Governance	Jumlah pelaksanaan forum informasi kewaspadaan dini terhadap bencana bagi masyarakat	√	√	√	√	√
3	Mengembangkan dan menyediakan Basis Data Informasi dan Peta Perkotaan yang terpadu dan mudah diakses	Membuat Sistem data Base yang dapat diakses secara umum	450.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Smart Governance	Tersedianya Informasi data dab peta yang efisien	√	√	√	√	√
4	Pembangunan Mall Pelayanan Terpadu 1 (Satu) atap yang melibatkan semua OPD, Kepolisian dan Stakeholder	Pembuatan sistem monitoring pelaksanaan APBG	250.000.000	BAPPEDA, Dinas Komunikasi Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Smart Governance	Tahun Pengembangan	√	√	√	√	√

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian				
							2022	2023	2024	2025	2026
5	Pemasaran Produk Destinasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi expo dan event promosi skala nasional</li> <li>- Pembentukan pusat oleh-oleh dan souvenir</li> <li>- Penyusunan paket wisata halal</li> </ul>	200.000.000	Dinas Pariwisata	<i>Smart branding</i>	Tersedianya fasilitas bazar dan promosi pameran pariwisata	√	√	√	√	√
6	Promosi Destinasi dan Objek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan pamphlet dan petunjuk arah destinasi</li> <li>- Penyusunan paket wisata digital</li> </ul>	200.000.000	Dinas Pariwisata	<i>Smart branding</i>	Tersedianya petunjuk arah dan arah evakuasi di destinasi	√	√	√	√	√
7	Peningkatan Pendataan Data Gender dan Anak	Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak	80.000.000	Dinas Komunikasi Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	<i>Smart Society</i>	Tersedianya aplikasi Data Gender dan Anak	√	√	√	√	√
8	Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BAPPEDA	<i>Smart Environment</i>	Persentase Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	√	√	√	√	√

### 4.2.3 Fase Program Jangka Panjang (Tahun 2022-2032)

Tabel 18 Fase Program Jangka Panjang (Tahun 2022-2032)

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian
1	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Penyusunan kebijakan Kawasan ramah anak pada ruang publik	300.000.000	BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	<i>Smart Governance</i>	Jumlah dokumen kebijakan	2032
2	Peningkatan kualitas layanan publik	Pembuatan kalender perencanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kegiatan Program Gampong (RPKG)	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, BAPPEDA, Dinas Komunikasi Informatika	<i>Smart Governance</i>	Tersusunnya kalender perencanaan penyusunan RPJMG dan RPKG	2032
3	Penataan Destinasi wisata baru	Pembangunan destinasi agrowisata rekomendasi terbaru	3.000.000.000	Dinas Pariwisata	<i>Smart Branding</i>	Tersedianya destinasi baru dan kelengkapan fasilitasnya	2032
4	Pembangunan Fasilitas Objek wisata	Rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas rumah ibadah dan MCK	500.000.000	Dinas Pariwisata	<i>Smart Branding</i>	Jumlah fasilitas rumah ibadah dan MCK yang direhabilitasi	2032
5	Pendataan dan penguatan bagi penyandang disabilitas masyarakat tidak mampu	Penyediaan Alat Bantu Untuk Penyandang Disabilitas	500.000.000	Dinas Sosial	<i>Smart Society</i>	Jumlah penerima bantuan	2033

6	Peningkatan Buku Bacaan dan Literasi pada perpustakaan di Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Program Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	500.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<i>Smart Society</i>	Jumlah koleksi buku perpustakaan	2032
7	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	1.500.000.000	Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	<i>Smart Environment</i>	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	2032

### 4.3 Quick Win

Dalam jangka pendek di tahun 2021-2022, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan program Portal Data Terbuka Bener Meriah sebagai kegiatan *Quick Win* pembangunan *Smart City*. Program ini memiliki dampak secara langsung kepada keterbukaan data yang masuk ke dalam 6 (enam) dimensi *Smart City* Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 19 Kegiatan Quick Win Smart City Kabupaten Bener Meriah

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
Nama Singkat Inovasi	Portal Data Terbuka Bener Meriah
Penjelasan Singkat	Aplikasi berbasis web yang memuat seluruh data satuan kerja pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan stakeholder terkait
Status Saat ini	Sudah tersedia domain <i>open data</i> Bener Meriah dan belum dimaksimalkan pada sisi kualitas dan kuantitas data
Manfaat dari inovasi	Untuk meningkatkan pelayanan umum pada instansi pemerintahan dengan adanya partisipasi masyarakat, serta meningkatnya inovasi sosial dan ekonomi masyarakat
Keunikan	Data berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antar instansi dalam lingkungan Kabupaten serta Provinsi
Mitra	Masyarakat, Relawan, Universitas
Potensi untuk Pengembangan Lebih Lanjut	Integrasi semua data yang melibatkan stakeholder lain, pengembangan tools yang ada, penerapan teknologi berbasis <i>Internet of Things (IoT)</i>
Strategi Menjaga Keberlangsungan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Dewan <i>Smart City</i> dan Tim Pelaksana</li> <li>- Melakukan review secara rutin membahas program dengan Dewan <i>Smart City</i></li> <li>- Koordinasi dan menyamakan persepsi dengan Stakeholder</li> <li>- Pengembangan layanan dan tools berdasarkan hasil review</li> <li>- Melakukan sosialisasi dan launching program kepada masyarakat</li> </ul>
Sumber Daya yang Digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan <i>Smart City</i></li> <li>- Tim Pelaksana <i>Smart City</i></li> </ul>
Analisis Resiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program membutuhkan komitmen bersama antara seluruh stakeholders sehingga perlu diadakan evaluasi secara rutin untuk menyamakan persepsi.</li> <li>- Membutuhkan tenaga operator yang banyak dan khusus menangani berbagai jenis dan kebutuhan data</li> </ul>
Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Data Terbuka Kabupaten Bener Meriah</li> <li>- Kualitas dan kuantitas data dari berbagai stakeholder dan evaluasi terkait hal tersebut</li> <li>- Keterlibatan stakeholder/pihak swasta, relawan dan masyarakat yang mendukung program Data Terbuka</li> </ul>

	- Peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Bener Meriah
Dimensi Smart City dan OPD	<p><b>Dimensi Smart City</b></p> <p><i>Smart Governance</i> Memberikan informasi publik secara terbuka dan transparansi</p> <p><i>Smart Branding</i> Memberikan kemudahan kebutuhan informasi tentang potensi pengembangan wisata lokal daerah</p> <p><i>Smart Economy</i> Membangun suasana industri yang kompetitif dengan menyajikan informasi produk unggulan daerah</p> <p><i>Smart Living</i> Membantu dalam menentukan keputusan yang lebih baik dalam bidang Kesehatan melalui keterbukaan data yang update setiap waktunya</p> <p><i>Smart Society</i> Membantu individu dalam bersikap untuk lebih proaktif dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi pada masyarakat</p> <p><i>Smart Environment</i> Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungan, memahami tata kelola limbah dan energi terbarukan</p> <p><b>SKPD</b> BAPPEDA Sekretariat Daerah Diskominfo Dinas Sosial</p> <p><b>Stakeholder</b> Badan Pusat Statistik Forum Kolaborasi Komunitas BUMN Media Masa Universitas</p>
Layanan yang Berkaitan	<a href="https://data.benermeriahkab.go.id">https://data.benermeriahkab.go.id</a>

## V. PENUTUP

Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPEB) dalam penyelenggaraan Pemerintah ke dalam Peraturan Bupati No 24 Tahun 2022. Dokumen SPBE ini merupakan panduan arah Kabupaten Bener Meriah dalam usaha menuju *Smart City* Bener Meriah. Disamping itu juga dipilihnya program portal Data Terbuka Kabupaten Bener Meriah sebagai *quick win Smart City* Kabupaten Bener Meriah. Rumusan program tersebut adalah wujud keterbukaan informasi sebagai bagian keniscayaan terhadap keterbukaan data. Langkah keterbukaan data mendorong majunya Kabupaten Bener Meriah ke arah lebih baik.

Program keterbukaan Data dan *Smart City* sudah disosialisasikan oleh Kementerian terkait yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tujuan sebagai akselerasi pembangunan dengan menggunakan Data Terbuka dan *Smart City*. Dengan mempertimbangkan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Bener Meriah, baik itu dari segi infrastruktur serta sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan tim terkait telah mengembangkan visi, strategi dan prioritas menuju *Smart City* Kabupaten Bener Meriah. Pembangunan prioritas *Smart City* Kabupaten Bener Meriah meliputi enam dimensi, yaitu tata kelola pemerintahan (*governance*), penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah (*branding*), perekonomian (*economy*), peningkatan kelayakan taraf hidup masyarakat (*living*), ekosistem sosial masyarakat (*social*), serta pengelolaan lingkungan (*environment*).

Program pembangunan *Smart City* Kabupaten Bener Meriah harus tetap sejalan dengan kaidah syari'ah Islam, mengingat nilai-nilai Islam merupakan keluhuran yang dijunjung tinggi di Kabupaten Bener Meriah sejak lama khususnya dan umumnya pada kabupaten/kota pada pemerintahan provinsi Aceh. Besar harapan, segala inovasi yang dirancang akan menjadi solusi yang signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sehingga pemerintah dapat memberikan layanan kepada publik dengan menyediakan lingkungan tempat tinggal yang berkelanjutan, layak serta meningkatkan daya saing daerah.

Dalam mewujudkannya tujuan dari *Smart City* Kabupaten Bener Meriah, pemerintah Kabupaten Bener Meriah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama antar sektor, baik itu dari pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta. Diperlukan penyesuaian persepsi dan

sinkronisasi untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dengan demikian pengembangan *Smart City* bisa menjadi efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif. Berbagai akselerasi pembangunan merupakan komitmen bersama seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan visi *Smart City* Kabupaten Bener Meriah, yaitu "Terwujudnya Bener Meriah yang Madani, Adaptif dan Inovatif".

Proses pengembangan menuju *Smart City* masih sangat panjang. kepala daerah, Dewan *Smart City* dan tim teknis berkomitmen untuk mewujudkan rencana induk *Smart City* dalam implementasi, maupun monitoring dan evaluasi sehingga akan berjalan dengan sistematis dan berkelanjutan. Pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang kontinu dan bertahap, maka dalam pengembangannya akan secara dinamis disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi setiap tahun terhadap rancangan yang telah dibuat dan perubahan tersebut akan dikuatkan dengan Peraturan Bupati atau Qanun Peraturan Daerah.